

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PARIWISATA PRDESAAN (DESA WISATA BRAYUT DAN DESA WISATA PAJANGAN

Seperti yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa dalam menilai kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan, peneliti mengawali pengukuran dengan menggunakan indikator *policy output* dan selanjutnya menggunakan indikator *policy outcome*.

A. ISI KEBIJAKAN

Peneliti mengukur Isi Kebijakan dengan cara melihat apakah indikator yang tertuang dalam Permen KM.18/HM.001/MKP/2011 tercapai atau tidak. Berikut adalah penjabaran satu per satu indikator capaian di masing-masing desa wisata:

a) Sumber Daya Yang Memadahi Untuk Mendukung Kebijakan

I. Masyarakat memahami tentang PNPM Mandiri Pariwisata

a. Desa Wisata Brayut

Peneliti dalam melakukan penelitian ini melakukan wawancara terhadap masyarakat di Desa Wisata Brayut. Wawancara salah satunya dilakukan terhadap salah satu petani bernama Hariyono (44 tahun). Berdasarkan keterangan yang didapat dari Hariyono, masyarakat di Desa Wisata Brayut mengetahui dengan baik tentang apa itu PNPM Mandiri Pariwisata. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat tersebut tidak terbatas pada warga yang aktif mengelola desa wisata, tetapi warga yang tidak aktif juga mengetahui. Menurut Hariyono, pengurus Desa Wisata Brayut seringkali menadakan rembug warga apabila ada bantuan dari pemerintah, baik PNPM Mandiri Pariwisata ataupun bantuan lainnya. Bahkan warga dapat

mengetahui tujuan diberikannya PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Brayut. Sosialisasi tentang PNPM Mandiri Pariwisata juga pernah dilakukan Disbudpar Kabupaten Sleman. Sosialisasi tidak terbatas pada pengurus desa wisata, tetapi sekaligus mengundang warga sekitar untuk datang ke ruang pertemuan warga (joglo utama).

Peneliti dalam mewawancarai Hariyono juga menanyakan beberapa hal terkait PNPM Mandiri Pariwisata. Peneliti mendapati bahwa Hariyono benar-benar mengetahui PNPM Mandiri Pariwisata, bahkan sampai jumlah dana yang dikucurkan serta alokasinya. Saat ditanya tentang tujuan program ini pun, Hariyono mengetahui. Padahal notabennya, Hariyono adalah bukan pengurus Desa Wisata Brayut, melainkan petani biasa yang memang seringkali menghadiri rembung warga. Menurut Hariyono, selain dirinya, banyak warga lain yang sering menghadiri rembung warga termasuk di dalamnya saat membahas PNPM Mandiri Pariwisata. Peneliti dalam hal ini dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Wisata Brayut memahami tentang PNPM Mandiri Pariwisata.

b. Desa Wisata Pajangan

Berbeda halnya dengan Desa Wisata Brayut, di mana masyarakat memahami dengan baik PNPM Mandiri Pariwisata, masyarakat di Desa Wisata Pajangan tidak memahami tentang PNPM Mandiri Pariwisata. Berdasar wawancara yang dilakukan terhadap Giyono (48 tahun) yang merupakan salah satu pedagang, dapat diketahui bahwa masyarakat hanya sekedar mengetahui bahwa dusunnya mendapatkan bantuan PNPM Mandiri Pariwisata dari pemerintah. Tetapi masyarakat tidak mengetahui tentang jumlah dan seluk beluk (latar belakang, tujuan, dll) dari PNPM Mandiri Pariwisata.

Giyono mengatakan bahwa selama ini kepala dusun tidak pernah mensosialisasikan tentang bantuan-bantuan yang diterima Desa Wisata Pajangan. Giyono saja hanya mengetahui bahwa Desa Wisata Pajangan mendapat PNPM Mandiri Pariwisata hanya dari 'mulut ke mulut'.

b. Pelaksana Kebijakan Telah Disebutkan Dengan Jelas atau Belum

1. LKM mampu merumuskan secara partisipatif dokumen perencanaan desa yang memuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata

Dalam menilai indikator kedua ini, peneliti tidak membedakan antara Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan karena terjadi kesamaan pada keduanya. Kesamaan ini dikarenakan LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang dimaksud yang membawahi Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan adalah sama. LKM dalam kasus ini merupakan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang ada di Kelurahan Pandowoharjo di mana Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Pandowoharjo.

LKM yang dalam praktiknya menjadi BKM pada Desa Pendowoharjo tidak sesuai dengan LKM yang dimaksud dalam Permen KM.18/HM.001/MKP/2011. Dalam peraturan tersebut LKM adalah lembaga yang dibentuk secara partisipatif oleh masyarakat dan bertugas sebagai pengelola pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata pada tingkat desa/kelurahan/kampung.

Menurut penelurusan peneliti, indikator kedua ini tidak tercapai di kedua desa wisata. Dalam pelaksanaannya, LKM tidak memiliki dokumen perencanaan desa termasuk di dalamnya tidak memiliki program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata. Selama ini perencanaan dimiliki dan dibuat masing-masing Desa Wisata. Dalam hal ini, BKM hanya menjadi 'perantara' bagi pusat kepada desa wisata dalam hal penyaluran dana PNPM Mandiri Pariwisata. Karena dalam alurnya, dana PNPM Mandiri Pariwisata untuk sampai ke Desa Wisata harus melalui tingkat kabupaten (Disbudpar Kabupaten Sleman) dan selanjutnya ke BKM sampai akhirnya diterima oleh desa wisata. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Darmadi (50 tahun) yang merupakan ketua pengurus Desa Wisata Brayut ketika ditanya oleh peneliti tentang peran dari LKM:

“Dana dari pemerintah untuk sampai saya (pengelola) ke desa wisata harus melalui desa, melalui BKM.... Enggak ada kalo program dari BKM, semua program semua rencana dibikinnya oleh pengelola desa wisata sendiri”. (Sabtu, 13 September 2014)

Setelah mendapatkan keterangan dari Darmadi, peneliti pun melakukan penelusuran ke BKM Kelurahan Pendowoharjo dan mewawancarai salah satu pengurus BKM yaitu Baroto. Baroto mengakui bahwa BKM tidak membuat perencanaan desa terutama terkait sektor pariwisata. Seperti yang dapat ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Tugas kami (BKM) kalo nyangkut PNPM Pariwisata itu cuma penyalur dana dari pusat ke desa wisata. BKM sudah nyerahin sudah percaya sama pengelola desa wisata buat bikin perencanaan sendiri. Lagian desa wisata yang dapat PNPM Pariwisata kan ada fasilitator, yang Pak Rudi di Brayut itu, nah desa wisata dibantu sama Pak Rudi buat bikin program“. (Sabtu, 13 September 2014)

Berdasarkan temuan di lapangan, maka dapat peneliti katakan bahwa indikator kedua ini tidak tercapai, baik di Desa Wisata Brayut maupun di Desa Wisata Pajangan.

c. Sejahu Kelompok-kelompok Kepentingan Terwadahi Di Dalam Kebijakan

1. Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana Bantuan Desa Wisata (BDW) secara transparan dan akuntabel serta diprioritaskan kepada kelompok miskin yang bergerak di sektor pariwisata

Akuntabilitas yang dimaksud dalam PNPM Mandiri Pariwisata menurut Permen KM.18/HM.001/MKP/2011 adalah PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit dan pemantauan program dan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Selain itu ada pengertian akuntabilitas sesuai dengan PTO Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2011, yaitu PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dengan membuat perencanaan dan pelaporan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. Sedangkan transparansi yang dimaksud dalam PTO Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2011

adalah PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi serta memberikan akses kepada semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai PNPM Mandiri Pariwisata.

a) Desa Wisata Brayut

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa indikator ketiga ini tercapai dengan baik di Desa Wisata Brayut. Pengurus Desa Wisata Brayut memiliki laporan lengkap tentang Desa Wisata Brayut, mulai dari laporan kegiatan, laporan kunjungan, jumlah homestay, fasilitas, dan tersedia juga laporan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata termasuk di dalamnya alokasi dana bantuan desa wisata. Selain itu, pengurus desa wisata mengizinkan siapa saja yang menginginkan laporan-laporan tersebut karena tersedia *softcopy* di pengurus desa wisata. Tetapi terdapat syarat apabila menginginkan laporan desa wisata, pihak yang menginginkan laporan untuk tujuan penelitian harus menunjukkan surat penelitian dari pihak kampus atau BAPPPEDA setempat.

Selain dari aspek kemudahan akses mendapatkan laporan tentang Desa Wisata Brayut, transparansi dan akuntabilitas juga harus dinilai sudut pandang masyarakat. Dalam hal ini harus dilihat apakah masyarakat di Desa Wisata Brayut mengetahui tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata beserta alokasi dana bantuan desa wisata. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu warga Brayut, yaitu Hariyono (44 tahun). Menurut Hariyono, pengurus Desa Wisata Brayut selalu melakukan sosialisasi melalui rembug warga tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa Wisata Brayut. Pengurus Desa Wisata Brayut seringkali mengadakan pertemuan dengan warga terutama apabila akan ada kunjungan wisata. Selain itu, pada saat dana bantuan desa wisata dikucurkan, pengurus desa wisata juga meminta persetujuan warga tentang rencana alokasi. Hariyono juga mengakui dirinya mengetahui tentang jumlah dana dan untuk apa saja dana tersebut dialokasikan. Menurut Hariyono, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh pengurus desa wisata.

Dengan mudahnya akses mendapatkan laporan tentang Desa Wisata Brayut termasuk di dalamnya laporan PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut dan masyarakat mengetahui tentang kegiatan desa wisata, rencana kegiatan, dan alokasi dana bantuan desa wisata, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata Brayut dalam melaksanakan dan merencanakan kegiatan sudah transparan dan akuntabel.

b) Desa Wisata Pajangan

Kondisi yang berbanding terbalik terjadi di Desa Wisata Pajangan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Menurut pengalaman peneliti saat mencari data tentang PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Pajangan menunjukkan bahwa sangat sulit mendapatkan informasi tentang alokasi PNPM Mandiri Pariwisata terutama terkait dengan alokasi dana bantuan desa wisata. Peneliti pada saat mencari data di Desa Wisata Pajangan bertemu dengan Kepala Dukuh atau Ibu Dukuh yaitu Ibu Tri Suprapti. Ketika ditanya tentang PNPM Mandiri Pariwisata, Tri tidak dapat menjelaskan secara *detail* tentang pelaksanaan dan alokasinya. Tri hanya dapat menjelaskan bahwa selama ini dana yang diterima hanya dialokasikan untuk membeli seperangkat gamelan untuk keperluan pertunjukkan seni yang ada di Desa Wisata Pajangan. Dan diakui oleh Tri bahwa Tri tidak memiliki laporan tentang pelaksanaan dan alokasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Pajangan.

Tak berhenti di Kepala Dukuh, peneliti juga mewawancarai warga Desa Wisata Pajangan yaitu Giyono (48 tahun). Menurut pengakuan Giyono, Giyono dan warga sekitar tidak pernah mengetahui secara pasti dana PNPM Mandiri Pariwisata digunakan untuk hal apa saja. Perangkat dusun Pajangan tidak pernah melibatkan dan mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang dana bantuan apapun termasuk dana bantuan PNPM Mandiri Pariwisata.

Hal serupa pun diakui oleh Haryanto (Kepala Seksi ODTW Disbudpar Kabupaten Sleman). Haryanto mengatakan bahwa Desa Wisata Pajangan tidak pernah memberikan

laporan tentang kegiatan di desanya termasuk laporan tentang PNPM Mandiri Pariwisata, seperti ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“tidak semua desa wisata di Sleman punya laporan *mas*, laporan kegiatan, laporan PNPM. Salah satunya itu Desa Wisata Pajangan. Pajangan itu jangankan laporan tentang PNPM Mandiri Pariwisata, laporan tentang kegiatan wisata saja mereka enggak punya dan enggak pernah melaporkan, ya padahal sudah sering diminta tapi enggak ditanggapi” (Selasa, 16 September 2014)

Dengan sulitnya peneliti mendapatkan data/laporan PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Pajangan, dan ketidaktahuan masyarakat tentang hal tersebut serta pengakuan dari Kepala Seksi ODTW Disbudpar Kabupaten Sleman, maka dapat peneliti simpulkan bahwa perangkat Desa Wisata Pajangan dalam melaksanakan dan merencanakan kegiatan tidak transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, indikator ketiga tidak tercapai dengan baik di Desa Wisata Pajangan.

d. Kebijakan tepat atau tidak

1. Pemerintah daerah telah menyusun kebijakan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin

Pemerintah daerah yang dimaksud dalam kasus ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Dalam menilai indikator keempat ini, peneliti tidak membedakan antara Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan karena terjadi kesamaan pada keduanya yaitu keduanya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Menurut penelusuran peneliti, Pemda Kabupaten Sleman pernah memiliki beberapa kebijakan tentang desa wisata terutama terkait dengan kebijakan pengembangan. Kebijakan ini pernah tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah pada tahun 1998. Selain itu, pengembangan desa wisata juga selalu mendapat bagian di dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maupun RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kabupaten Sleman.

Selain memiliki kebijakan secara tertulis seperti yang dipaparkan sebelumnya, Bupati Sleman juga memiliki kebijakan tidak tertulis terkait dengan desa wisata. Kebijakan tersebut

berbunyi bahwa setiap pendatang atau pihak yang ingin melakukan penelitian atau kunjungan atau mencari pembelajaran terkait desa wisata dan sektor pertanian di Kabupaten Sleman diwajibkan untuk tinggal di Desa Wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Tujuan dari kebijakan bupati ini adalah agar kunjungan desa wisata di Kabupaten Sleman meningkat dan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di desa wisata. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Darmadi (Ketua Pengurus Desa Wisata Brayut) berikut ini:

“kalau dari bupati Sleman sendiri ada aturan, misal ada pendatang pengen belajar tentang Sleman, belajar tentang desa wisata atau belajar pertanian ya mereka wajib nginep di desa wisata di Sleman. Kalo kaya gitu kan sama-sama untung, pendatang bisa interaksi langsung sama warga di desa, dapat informasi lebih juga. Nah warganya juga dapat tambahan uang, kan bayar *tho* nginepnya, ya makannya, ya londrinya. Brayut juga banyak kedatangan tamu buat penelitian, ga cuma seorang dua orang loh *mas*, kadang bisa sampe belasan, dari dinas di mana-mana di Indonesia”. (Sabtu, 20 September 2014)

Terkait dengan desa wisata, saat ini juga Pemda Kabupaten Sleman tengah sedang dalam proses pembuatan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Sleman. Peneliti dalam hal ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan *draft* Peraturan Bupati terserbut dari Haryanto selaku Kepala Seksi ODTW Disbudpar Kabupaten Sleman. Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman pembentukan dan pengelolaan serta pengembangan desa wisata. Dalam Peraturan Bupati juga akan ada aturan pembinaan desa wisata agar desa wisata dapat lebih berkembang.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa indikator keempat sudah tercapai dengan baik karena Pemda Kabupaten Sleman sudah lama sampai saat ini membuat kebijakan pengembangan pariwisata termasuk di dalamnya pengembangan desa wisata secara konsisten.

e. Sejahtera Kebijakan Tersebut Menghasilkan Tingkat Perubahan Terhadap Kondisi Yang Ada Pada Saat Ini

1. Meningkatnya jumlah kunjungan, lama tinggal, dan jumlah pembelanjaan wisatawan pada DTW (Daya Tarik Wisata)

a) Desa Wisata Brayut

Desa Wisata Brayut termasuk desa wisata di Kabupaten Sleman yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan cukup banyak, terutama setelah mendapat PNPM Mandiri Pariwisata sejak tahun 2009 sampai 2011. Berikut adalah rekapitulasi jumlah kunjungan wisatawan di desa wisata Brayut dari tahun 2006 sampai tahun 2012:

Tabel 3.1

Data Kunjungan Wisatawan di Desa Wisata Brayut Tahun 2006 - 2012

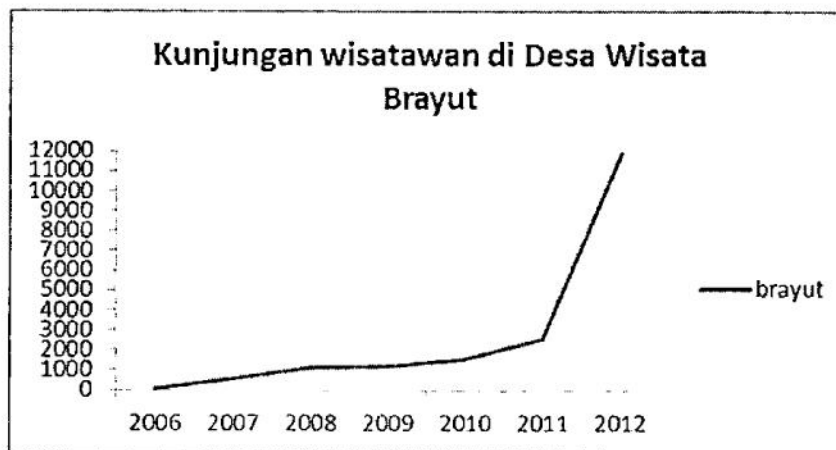
Desa wisata	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Brayut	57	560	1128	1184	1542	2523	11874

Sumber: diolah dari Laporan Desa Wisata Brayut

Atau seperti digambarkan dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.1

Data Kunjungan Wisatawan di Desa Wisata Brayut Tahun 2006 - 2012



Dapat terlihat dari tabel dan grafik bahwa jumlah kunjungan di Desa Wisata Brayut selalu meningkat setiap tahunnya terutama setelah mendapatkan PNPM Mandiri Pariwisata di tahun 2009, 2010, dan 2011.

Terkait dengan lama tinggal, tidak ada data yang pasti di Desa Wisata Brayut. Tetapi berdasar wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketua pengurus Desa Wisata Brayut, Darmadi, diketahui bahwa data jumlah kunjungan yang ada (sesuai di tabel 3.1) adalah data pengunjung yang menginap di Desa Wisata Brayut. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Desa Wisata Brayut adalah berkisar antara tiga sampai lima hari.

Tentang meningkatnya jumlah pembelanjaan, hal tersebut sulit untuk dilakukan penilaian karena di pengurus Desa Wisata Brayut sendiri tidak memiliki data terkait tentang jumlah pembelanjaan wisatawan. Tetapi menurut Darmadi jumlah pembelanjaan bisa saja diukur dari pendapatan Desa Wisata Brayut termasuk pendapatan masyarakatnya. Walaupun tidak ada data yang pasti tentang pendapat di kas desa dan pendapatan masyarakat, Darmadi mengakui bahwa pendapatan desa yang masuk ke dalam kas desa dan pendapatan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah pendapatan kas desa dan pendapatan masyarakat di Desa Wisata Brayut diperoleh dari biaya *homestay*, konsumsi.

Selain itu, diakui oleh Darmadi bahwa dengan adanya PNPM Mandiri Pariwisata sangat berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah kunjungan, lama tinggal, dan jumlah pembelanjaan di Desa Wisata Brayut. Hal tersebut terjadi karena PNPM Mandiri Pariwisata menjadikan kualitas Desa Wisata Brayut menjadi lebih baik, baik dari segi pelayanan dan sarana prasarana. Hal tersebut seperti yang dikatakan Darmadi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“PNPM pariwisata di Brayut itu dananya dipakai untuk pengembangan SDM, itu yang pertama yang tahun 2009. Jadi memang pengurus sudah menargetkan pertama yang harus ditingkatin itu adalah SDM nya supaya pelayanannya bagus. SDM yang ada di Brayut banyak dikasih pelatihan-pelatihan buat

meningkatkan kapasitas. Selanjutnya dana yang tahun 2010 dan 2011 baru buat beli perlengkapan fisik, benerin infrastruktur. Meningkatnya kualitas SDM dan infrastruktur di Brayut ngebuat tamu betah dan pengen datang lagi. Dan ngasih tau teman-teman di daerahnya buat datang ke Brayut. Jadi jelas banget ya *mas* kalo PNPM Pariwisata itu ngebuat Brayut lebih maju". (Senin, 22 September 2014)

Dari data kunjungan dan beberapa pemaparan yang diungkapkan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa indikator kelima tercapai dengan baik di Desa Wisata Brayut.

b) Desa Wisata Pajangan

Desa Wisata Pajangan termasuk desa wisata di Kabupaten Sleman yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang tidak banyak. Berikut adalah data kunjungan di Desa Wisata Pajangan dari tahun 2006 sampai tahun 2012:

Tabel 3.2

Data Kunjungan Wisatawan di Desa Wisata Pajangan Tahun 2006 – 2012

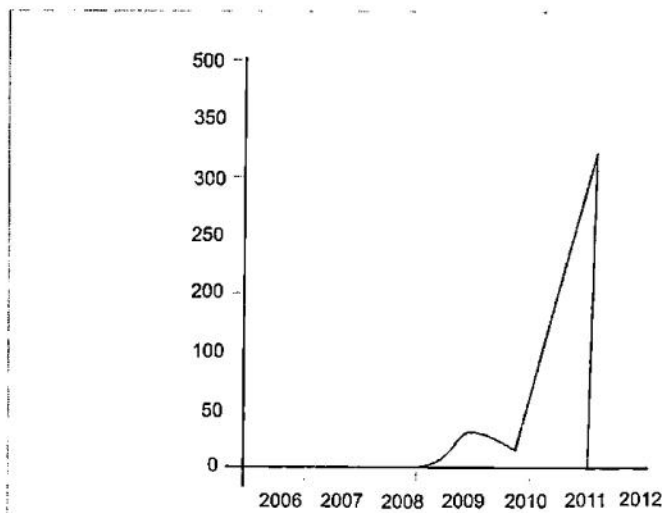
Desa Wisata	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pajangan	0	0	0	31	22	337	0

Sumber: Diolah dari data desa wisata di Disbudpar Kabupaten Sleman

Atau seperti digambarkan dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.2

Data Kunjungan Wisatawan di Desa Wisata Pajangan Tahun 2006 - 2012



Dapat terlihat dari tabel dan grafik bahwa jumlah kunjungan di Desa Wisata Pajangan tidak berubah secara signifikan dari tahun ke tahun. Adanya PNPM Mandiri Pariwisata di tahun 2009, 2010, dan 2011 tidak berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Desa Wisata Pajangan.

Terkait dengan lama tinggal wisatawan di Desa Wisata Pajangan, hal tersebut merupakan hal yang sulit dicatat. Karena menurut beberapa keterangan dari warga Pajangan, Kepala Dukuh Pajangan, Kepala Seksi ODTW Disbudpar Sleman, dan Ketua Forum Komunikasi desa wisata Kabupaten Sleman, kesemuanya memberikan informasi yang serupa bahwa kebanyakan bahkan hampir semua wisatawan yang datang ke Desa Wisata Pajangan tidak menginap melainkan hanya sekedar berkunjung atau 'pulang pergi'. Tidak adanya pengunjung yang menginap salah satunya dikarenakan oleh tidak adanya *homestay* yang disediakan di Desa Wisata Pajangan. Kebanyakan wisatawan berkunjung ke Desa Wisata Pajangan hanya untuk belajar gamelan yang ada di rumah kepala dukuh. Kondisi demikian seperti dapat digambarkan pada kutipan wawancara dengan Kepala Dukuh (Tri Suprapti) berikut ini:

“Mereka (wisatawan) kebanyakan datang, melihat, atau ikut aktivitas kesenian dan budaya di Pajangan, terus pulang. Kadang ada yang datang cuma pengen belajar gamelan terus pulang. Tadi apa kata *mas? Homestay?* Enggak ada itu di Pajangan. Soalnya memang enggak ada yang suka nginep dari dulu. Kalaupun ada tamu dari luar kota pengen nginep yaa nginep di rumah saya juga cukup, enggak banyak juga yang nginep”. (Sabtu, 27 September 2014)

Selanjutnya tentang jumlah pembelanjaan wisatawan di Desa Wisata Pajangan, hal tersebut sulit untuk dinilai karena memang tidak ada laporan mengenai hal tersebut. Seperti halnya di Desa Wisata Brayut, jumlah pembelanjaan bisa saja dilihat dari pendapatan yang masuk ke kas desa dan pendapatan masyarakat. Menurut keterangan dari Kepala Dukuh dapat dikatakan bahwa pendapatan kas desa tidak mengalami peningkatan walaupun sudah ada PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Pajangan. Selain itu menurut salah satu warga yang bernama Giyono (48 tahun), pendapatan masyarakat pun tidak terpengaruh atau tidak

meningkat sama sekali dari Desa Wisata Pajangan. Hal tersebut tentu saja dapat dimaklumi karena wisatawan yang berkunjung sangat sedikit dan sekalipun ada wisatawan, para wisatawan tidak ‘menghabiskan’ uang di Desa Wisata Pajangan karena para wisatawan tidak menginap di sana.

Dari data kunjungan dan beberapa pemaparan yang diungkapkan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa indikator kelima tidak tercapai di Desa Wisata Pajangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak meningkatnya jumlah wisatawan, lama tinggal, dan jumlah pembelanjaan wisatawan meskipun Desa Wisata Pajangan sudah menerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata pada tahun 2009, 2010, dan 2011.

f. Jenis Manfaat Yang Diterima Oleh Kelompok-kelompok Kepentingan Melalui Kebijakan.

1. Terbukanya lapangan kerja dan usaha di desa wisata

a) Desa Wisata Brayut

Dengan banyaknya kunjungan wisatawan dan kegiatan wisata di Desa Wisata Brayut, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap terbukanya lapangan kerja dan usaha di desa wisata baik dalam layanan barang atau jasa. Salah satu usaha yang banyak dilakukan adalah dengan memanfaatkan rumah penduduk menjadi *homestay*. Dengan dijadikannya rumah sebagai *homestay* tentu saja dapat menambah pendapatan bagi masyarakat Brayut. Sampai tahun 2013, tercatat ada 24 *homestay* yang ada di Desa Wisata Brayut dengan jumlah kapasitas mencapai 151 orang. Berikut adalah data *homestay* yang ada di Desa Wisata Brayut

Tabel 3.3

Homestay di Desa Wisata Brayut

No	RT/RW	Homestay	Kapasitas
1	Jan-28	Ibu Endang	6
2		Ibu Riyanto	8
3		Ibu Indi	8
4		Ibu Tarno Utomo	4
5		Ibu Siti	6
6	Feb-28	Ibu Ndaru	6
7		Ibu Maryono	4
8		Ibu Yani	12
9		Ibu Dewi	4
10		Ibu Mantoro	4
11		Ibu Rini	2
12		Ibu Martono (ibu rin)	4
13		Ibu Marsudi	4
14	Mar-29	Ibu Narti	8
15		Ibu Sutarmin	8
16	Apr-29	Ibu Tari	6
17		Ibu Sunardiman	12
18		Ibu Muliman	12
19		Ibu Dalim	9
20		Ibu Sudarjo	4
21		Ibu Sudiarto	6
22		Ibu Wiwik	6
23		Ibu Supiyah	4
24		Ibu Feri	4
	Total		151

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Selain *homestay*, jenis usaha yang muncul sebagai akibat adanya aktivitas desa wisata di Brayut adalah usaha *laundry*, warung kopi, warung kelontong, penyewaan alat pemancingan, penyewaan alat pertanian, dan toko permainan tradisional. Dari segi terbukanya lapangan kerja, kegiatan desa wisata sangat banyak membuka lapangan kerja di Desa Wisata Brayut, baik pekerjaan sampingan bagi warga yang memang sudah bekerja di sektor lain maupun pekerjaan baru bagi warga yang sebelumnya pengangguran. Contoh pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan desa wisata adalah pemandu. Pemandu di sini terdapat di beberapa sektor seperti pemandu belajar karawitan, pemandu belajar menari, pemandu membuat panganan tradisional, pemandu belajar permainan tradisional, dll. Hal ini seperti yang diungkapkan Darmadi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“jelas ngaruh lah *mas* kalo lapangan kerja, bayangin saja ya, pemuda-pemuda di sini yang masih sekolah yang belum kerja bisa jadi pemandu dengan bakat-bakat mereka. Ada yang jago karawitan, bikin mainan, jago nari, ya mereka-mereka itu yang ngelatih tamu. Terus ada lagi ibu-ibu yang tadinya cuma ibu rumah tangga, mereka ngajarin tamu bikin jajanan tradisional, yang bisa ngebatik ya ngajarin batik. Banyak lah tuh *mas*. Selain dapat kerjaan baru kan mereka juga dapat honor..... Kalo usaha ya *mas* bisa lihat sendiri, banyak *tho* rumah yang ada tulisan *homestay*, ada yang bikin *laundry*. Jadi dengan banyaknya wisatawan ya sudah pasti lapangan kerja dan usaha itu nambah di Brayut”. (Sabtu, 27 September 2014)

Dari apa yang dipaparkan sebelumnya, dapat peneliti simpulkan bahwa dengan adanya kegiatan desa wisata dan banyaknya kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Brayut menciptakan lapangan kerja dan usaha baru. Dengan kata lain indikator keenam berhasil dicapai di Desa Wisata Brayut.

b) Desa Wisata Pajangan

Berkebalikan dengan kondisi yang ada di Desa Wisata Brayut, disandangnya gelar desa wisata di Dusun Pajangan tidak membawa perubahan terhadap terbukanya lapangan kerja dan usaha. Hal ini dapat dimaklumi, karena seperti apa yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Desa Wisata Pajangan sangat sedikit meskipun sudah

mendapat manfaat PNPM Mandiri Pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan yang sedikit tersebut menjadikan masyarakat di Desa Wisata Pajangan tidak merasakan dampak peningkatan ekonomi, sehingga masyarakat Desa Wisata Pajangan lebih memilih untuk fokus mengerjakan pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu mayoritas bertani dan beternak.

Menurut observasi yang dilakukan peneliti selama berkali-kali, suasana di Desa Wisata Pajangan mengesankan wilayah ini hanyalah dusun biasa. Tidak ada fasilitas yang menunjang seperti *homestay*, apalagi kegiatan wisata. Masyarakat di Pajangan pun sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan kutipan wawancara berikut ini:

“Dari dulu warga di sini ya petani, peternak, ada juga yang jadi pns beberapa. Jadi *enggak* ada bedanya jadi desa wisata atau *enggak*. Pajangan kan kalau *enggak* salah jadi desa wisata tahun 2002, ya dari 2002 gitu-gitu aja *mas*. *Enggak* ada usaha baru, kalau warung ya itu dari dulu sudah ada” (Giyono, 48 tahun, warga Pajangan). (Senin, 29 September 2014)

Dari pemaparan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa indikator keenam tidak tercapai di Desa Wisata Pajangan karena tidak terbukanya lapangan kerja dan usaha baru.

Sebelumnya sudah dijelaskan tentang capaian indikator keberhasilan PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan. Berikut ini adalah tabel capaian indikator *output* untuk lebih memudahkan pembaca memahami tentang capaian keenam indikator yang sudah dipaparkan sebelumnya:

Tabel 3.4
 Capaian indikator *output* PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan

No	Indikator	Desa Wisata Brayut	Desa Wisata Pajangan
1	Masyarakat memahami tentang PNPM Mandiri Pariwisata	Tercapai, Masyarakat sering diberikan laporan/sosialisasi baik oleh dinas, pengurus desa wisata	Tidak tercapai, Masyarakat hanya sekedar mengetahui desanya diberi manfaat desa wisata, tetapi tidak tahu <i>detail</i> nya
2	LKM mampu merumuskan secara partisipatif dokumen perencanaan desa yang memuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata	Tidak tercapai, LKM (BKM Kelurahan Pendowoharjo) hanya mengurus aliran dana PNPM Mandiri Pariwisata dari pusat	Tidak tercapai, LKM (BKM Kelurahan Pendowoharjo) hanya mengurus aliran dana PNPM Mandiri Pariwisata dari pusat
3	Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana Bantuan Desa Wisata (BDW) secara transparan dan akuntabel serta diprioritaskan kepada kelompok miskin yang bergerak di sektor pariwisata	Tercapai, Terdapat laporan yang rinci termasuk di dalamnya alokasi dana BDW, dan masyarakat setempat mengetahui	Tidak tercapai, alokasi dana BDW tidak jelas, tidak ada laporan yang jelas, dan masyarakat setempat tidak mengetahui
4	Pemerintah daerah telah menyusun kebijakan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin	Tercapai, Terdapat kebijakan dari pemda khususnya dari bupati yang berkoordinasi dengan Disbudpar dan Dinas Sosial Kab Sleman	Tercapai, Terdapat kebijakan dari pemda khususnya dari bupati yang berkoordinasi dengan Disbudpar dan Dinas Sosial Kab Sleman
5	Meningkatnya jumlah kunjungan, lama tinggal dan jumlah pembelanjaan wisatawan pada DTW	Tercapai, Terjadi peningkatan	Tidak tercapai, Tidak terjadi peningkatan
6	Terbukanya lapangan kerja dan usaha di desa wisata.	Tercapai, Banyak usaha baru (barang/jasa)	Tidak tercapai, Tidak ada perubahan, rata-rata masyarakat hanya menjadi petani/peternak

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa indikator *output* lebih banyak tercapai di Desa Wisata Brayut daripada di Desa Wisata Pajangan. Jika capaian indikator di kedua desa wisata tersebut dikomparasikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata (berdasar indikator *policy output*) di Desa Wisata Brayut lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Wisata Pajangan.

A. KONTEKS KEBIJAKAN

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan dinilai dari dua indikator yaitu indikator *output* dan indikator *outcome*. Pada bagian ini dibahas tentang indikator *outcome*, di mana peneliti menilai berdasarkan perubahan kondisi di Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan sebelum dan sesudah menerima PNPM Mandiri Pariwisata, terutama dinilai dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di kedua desa wisata tersebut. Apakah masyarakat menjadi lebih sejahtera setelah desanya mendapat PNPM Mandiri Pariwisata? Ataukah tidak? Di bawah ini adalah penjabarannya.

1. Desa Wisata Brayut

PNPM Mandiri Pariwisata memberikan dampak yang baik bagi pengembangan kualitas Desa Wisata Brayut. Dengan adanya dana bantuan desa wisata dalam PNPM Mandiri Pariwisata, pengurus Desa Wisata Brayut dapat memberikan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM di Desa Wisata Brayut. Selain itu, dana yang didapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Wisata Brayut. Peningkatan kualitas SDM dan fasilitas desa wisata tentu saja sekaligus meningkatkan pelayanan Desa Wisata Brayut. Dengan pelayanan yang lebih baik semenjak mendapat PNPM Mandiri Pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan di Desa Wisata Brayut pun semakin meningkat. Hal tersebut langsung berpengaruh terhadap pendapatan di Desa Wisata Brayut, baik untuk kas desa maupun pendapatan masyarakat di Desa Wisata Brayut.

Pendapatan masyarakat yang meningkat merupakan akibat dari terbukanya lapangan kerja baru dan usaha baru di Desa Wisata Brayut, di mana sebelum Desa Wisata Brayut maju seperti sekarang ini, masyarakatnya hanya merupakan petani dan peternak biasa. Misalnya saja bagi masyarakat yang menjadikan rumahnya sebagai *homestay*, pemilik rumah memperoleh peningkatan pendapatan sebesar Rp 65.000,00 setiap ada wisatawan yang menginap per harinya. Selain itu, masyarakat yang menjadi pemandupun memperoleh pendapatan dari honor pemandu. Uang yang dibayarkan wisatawan di setiap kunjungan tidak hanya “masuk” ke kas desa wisata, tetapi juga “masuk” ke masyarakat secara langsung. Hal tersebut menjadikan pendapatan masyarakat bertambah seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang dan menginap di Desa Wisata Brayut serta melakukan kegiatan wisata di Desa Wisata Brayut. Berikut adalah gambaran tentang pembagian honor yang didapat masyarakat di Desa Wisata Brayut ketika ada kunjungan wisatawan:

Tabel 3.5

Pembagian Pendapatan Hasil Kegiatan Pariwisata
Desa Wisata Brayut

No.	Nama Paket Wisata	Harga	Alokasi		
			Pemandu	Kas Desa Wisata	Dan Lain-lain
1	Belajar Karawitan	Rp 8.000,- per orang	Rp 5.000,-	Rp 3.000,-	-
2	Belajar tarian tradisional	Rp 8.000,- per orang	Rp 5.000,-	Rp 3.000,-	-
3	Belajar membuat batik	Rp 20.000,- per orang	20% dari sisa hasil pengurangan biaya membeli minyak tanah, lilin, kain, pola, <i>finishing</i> dan biaya pengiriman.	80% dari sisa hasil pengurangan biaya membeli minyak tanah, lilin, kain, pola, <i>finishing</i> dan biaya pengiriman.	Dikurangi biaya membeli minyak tanah, lilin, kain, pola, <i>finishing</i> dan biaya pengiriman.
4	Membuat makanan tradisional	Rp 8.000,- per orang	Rp 5.000,-	Rp 3.000,-	-
5	Permainan tradisional	Rp 3.500,- per orang	-	Rp 3.500,-	-
6	Jathilan	Rp 500.000,- per babak	-	Rp 100.000,-	Rp 400.000,- untuk kelompok Jathilan.
7	Kegiatan pertanian	Rp 8.000,- per orang	-	Sisa hasil pengurangan sewa sapi dan sawah.	Rp 60.000,- sewa 2 ekor sapi. Rp 100.000,- sewa sawah 2 petak.
8	Menangkap ikan	Rp 4.000,- per orang	-	Sisa hasil pengurangan pembelian ikan.	Pembelian ikan bawal disesuaikan jumlah wisatawan.
8	Kegiatan peternakan	Rp 5.000,- per orang	-	Rp 3.000,-	Rp 2.000,- untuk pemilik sapi.
9	Permainan di dalam lumpur	Rp 5.000,- per orang	-	Rp 5.000,-	-
10	Kerajinan janur	Rp 3.000,- per orang	-	Rp 3.000,-	-
11	Makan malam Kenduri	Rp 18.000,- per orang	-	Sisa hasil pengurangan membeli bahan makanan dan insentif untuk undangan.	Membeli bahan makanan dan insentif untuk undangan.
12	Tour keliling Yogyakarta	Menyesuaikan destinasi dan kegiatan yang ingin dilakukan	-	Sisa hasil pengurangan biaya yang dikeluarkan.	Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan di luar.
13	Parkir	Dalam dusun (roda 2 dan 4)	-	-	Antara Rp 30.000,- hingga Rp 50.000,- tergantung situasi.
		SMA (bus besar)	-	-	Minimal Rp 25.000,- untuk penjaga SMA.
14	Biaya masuk Brayut	Tidak menginap	-	Rp 6.000,-	-
		Menginap	-	Rp 9.000,- (sudah tergabung dalam biaya menginap di <i>homestay</i>).	-

Sumber: diolah dari data pengurus Desa Wisata Brayut

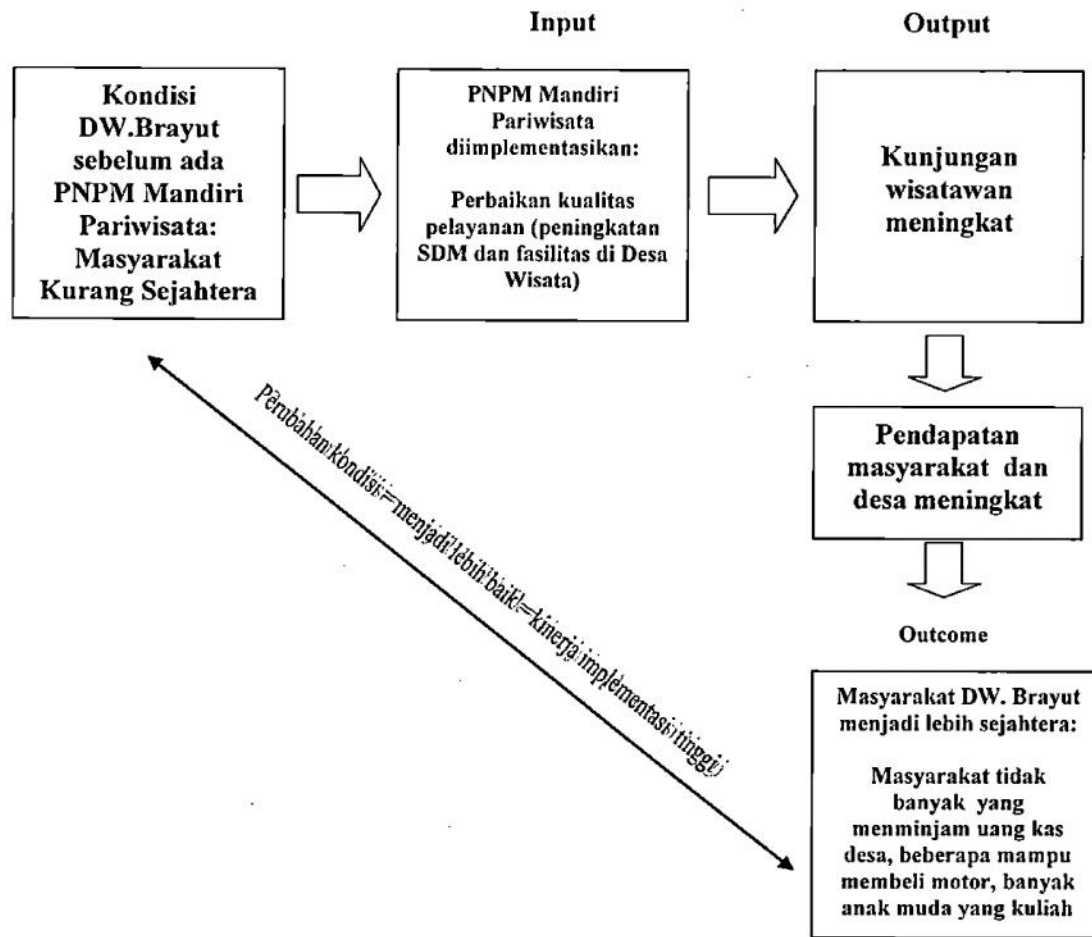
Dapat terlihat dari tabel pembagian pendapatan hasil di atas bahwa masyarakat secara langsung dapat merasakan penambahan pendapatan. Hal tersebut menjadikan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Diakui oleh Darmadi (Ketua Pengurus Desa Wisata Brayut), sebenarnya tidak ada perhitungan yang pasti tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Darmadi meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa Wisata Brayut dapat terlihat dari beberapa indikator, misalnya saja beberapa masyarakat sudah mampu membeli motor, lalu beberapa anak sudah dapat berkuliah. Selain itu dapat terlihat dari berkurangnya masyarakat di Desa Wisata Brayut yang meminjam uang kas desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Darmadi berikut ini ketika ditanya tentang perubahan kondisi sebelum dan sesudah adanya PNPM Mandiri Pariwisata:

“*enggak* ada sih *mas* kalau hitungan-hitungan yang pasti tentang pendapatan masyarakat atau nambahnya tingkat kesejahteraan, tapi bisa keliatan dari sehari-harinya *mas*. Sekarang masyarakat di sini banyak yang punya motor, sudah ada juga anak-anak muda yang kuliah. Dari situ saja sudah keliatan ya *mas* masyarakat di sini lebih sejahtera dari sebelumnya. Dan juga sekarang sudah jarang sekali *mas* warga yang minjam uang kas desa buat keperluan sehari-hari kayak beli bibit buat bertani, pupuk, dll. Kaya yang tadi sudah saya jelasin *mas*, PNPM Pariwisata itu menjadikan kualitas pelayanan di Brayut jadi tambah bagus, tamu tiap tahun nambah terus, yang pastinya bikin pendapatan masyarakat bertambah sehingga masyarakat di Brayut tambah sejahtera”. (Sabtu, 13 September 2014)

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa terjadi perubahan kondisi sebelum dan sesudah adanya PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut. Perubahan kondisi tersebut adalah perubahan yang positif, di mana sebelumnya masyarakat di Desa Wisata Brayut kurang sejahtera dan setelah adanya PNPM Mandiri Pariwisata masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dengan kata lain, berdasar pengukuran indikator *outcome* maka implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut memiliki kinerja yang baik atau tinggi. Untuk memperjelas bagaimana perubahan kondisi di Desa Wisata Brayut, peneliti menggambarkan dengan gambar di bawah ini.

Bagan 3.1

Perubahan kondisi sebelum dan sesudah implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut



2. Desa Wisata Pajangan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa PNPM Mandiri Pariwisata yang diimplementasikan di Desa Wisata Pajangan tidak membuat perubahan kondisi di Desa Wisata Pajangan. Dana PNPM Mandiri Pariwisata yang diterima Desa Wisata Pajangan hanya digunakan untuk membeli seperangkat gamelan dan bukan untuk mengembangkan SDM. Padahal esensi dari PNPM Mandiri Pariwisata sebenarnya adalah peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan tidak diadakannya peningkatan kapasitas masyarakat di Desa Wisata Pajangan menjadikan kualitas desa wisata menjadi stagnan dan

tidak ada perbaikan. Stagnannya kualitas menjadikan wisatawan tidak banyak berkunjung ke Desa Wisata Pajangan. Dengan sedikitnya wisatawan yang berkunjung, hal tersebut tentu saja menjadikan pendapatan masyarakat tidak meningkat dan tidak terbukanya lapangan kerja dan usaha baru. Sampai saat ini mayoritas masyarakat di Desa Wisata Pajangan merupakan petani dan peternak. Disandangnya gelar desa wisata tidak mengubah keadaan yang ada di Desa Wisata Pajangan. Diakui oleh salah satu warga yaitu Giyono, bahwa masih banyak masyarakat di Desa Wisata Pajangan yang kurang sejahtera terutama petani dan peternak seperti yang dikatakan Giyono berikut ini:

“masyarakat di sini banyaknya bertani ama ternak, pendapatannya jelas sedikit, bahkan banyaknya tuh buruh tani. Dari dulu sampai sekarang tetap kaya gitu. Kalau kata *mas* harusnya PNPM Pariwisata bisa bikin sejahtera, itu *enggak mas* di sini. Masyarakat saja banyak yang *enggak* tahu apa itu PNPM Pariwisata” (Sabtu, 13 September 2014)

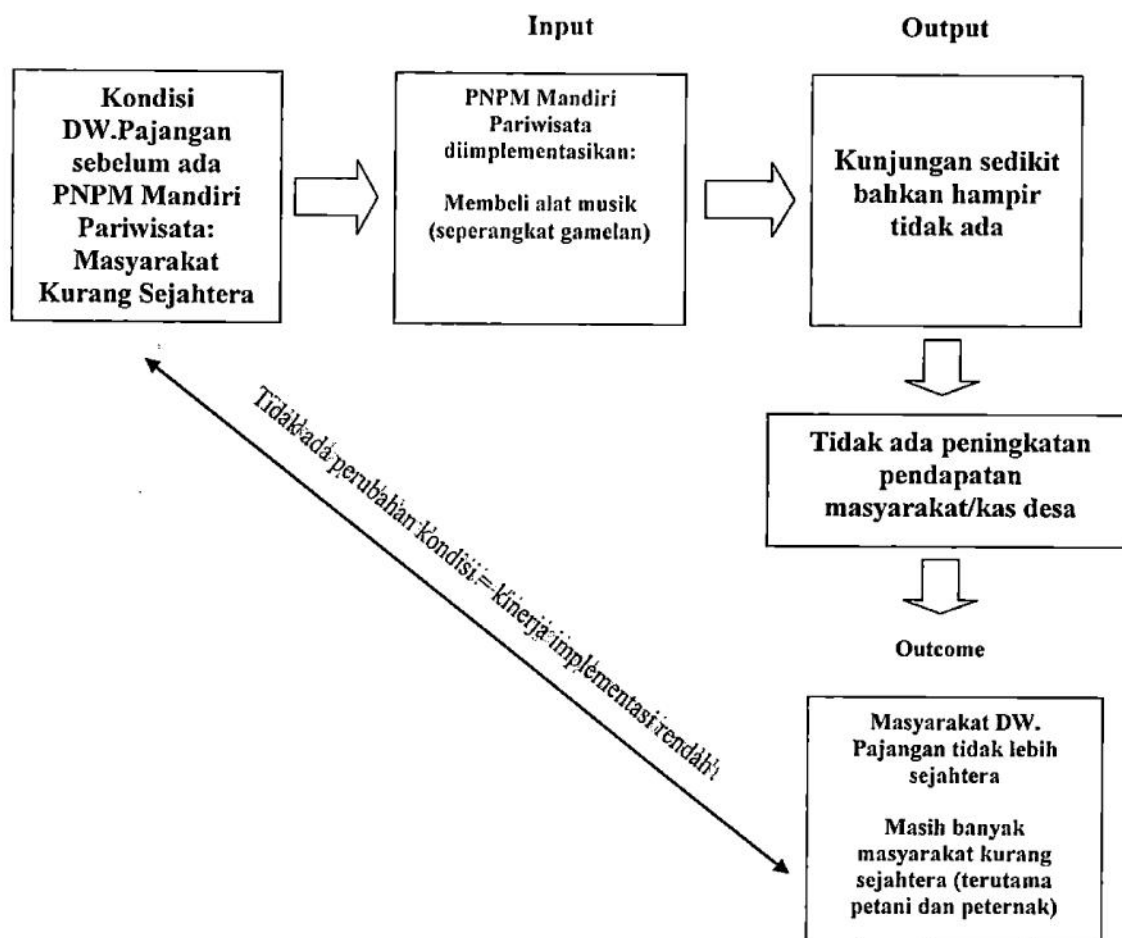
Selain tidak adanya tambahan pendapat bagi masyarakat di Desa Wisata Pajangan, diakui oleh Kepala Padukuhan (Tri Suprapti) bahwa kegiatan desa wisata juga tidak memberikan tambahan pendapatan terhadap kas desa, seperti diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“*enggak* ada *je mas*. Pemasukan ke kas padukuhan tidak ada, ke masyarakat juga tidak ada. Kegiatan di sini lebih banyak budaya musik, jadi kalau ada tamu yang datang tidak sampai menginap” (Sabtu, 13 September 2014)

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa tidak terjadi perubahan kondisi sebelum dan sesudah adanya PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Pajangan. Jika sebelum adanya PNPM Mandiri Pariwisata masyarakat di Desa Wisata Pajangan kurang sejahtera, maka begitupun halnya sesudah adanya PNPM Mandiri Pariwisata. Dengan kata lain, berdasar pengukuran indikator *outcome* maka implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Pajangan memiliki kinerja yang rendah.

Bagan 3.2

Perubahan kondisi sebelum dan sesudah implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Pajangan



B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata Desa Wisata Berayut Dan Desa Wisata Pajangan, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Tahun 2009 hingga 2011.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Desa Wisata Brayut:

- a. Masyarakat di Desa Wisata Brayut cenderung aktif dan antusias dalam mengembangkan desa wisata.

Masyarakat Desa Brayut sangat antusias sejak pertama kali datangnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang di buat oleh pemerintah, di Desa Brayut sampai diadakan sosialisasi mengenai program PNPM Mandiri. Ini mengakibatkan masyarakat berperan aktif dalam membangun dan mengenalkan desanya, sehingga program-program yang dibuat bisa berjalan dengan efektif.

- b. Pengurus dan kelembagaan di Desa Wisata Brayut sangat jelas dan pengurus sangat bertanggungjawab terhadap keberlangsungan Desa Wisata Brayut.

Di Desa Brayut struktur pengurusnya tertata dengan rapih, setiap ada rapat mengenai PNPM Mandiri seluruh masyarakat di undang untuk berpartisipasi. Disini pengurus berperan penting dalam kemajuan program-program yang dibuat Desa serta dukungandari masyarakat yang membuat perjalanan kepengurusan semakin lebih ringan.

- c. Masyarakat Desa Brayut memhami tentang PNPM Mandiri Pariwisata

Pemahaman masyarakat Desa Brayut mengenai PNPM Mandiri jangan diragukan karna seluruh masyarakat Brayut memahami dan mengerti dengan benar terkait Program pemerintah yang satu ini. Semua karna adanya pelatihan-pelatihan serta sosialisasi yang dilakukan pengurus dan instansi-instansi terkait mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Ketika ada informasi atau kabar mengenai PNPM Mandiri pengurus langsung mengadakan rapat dan segera mensosialisasikan kepada masyarakat Desa.

- d. Adanya transparansi Program dan Anggaran

Trasparansi Program dan Anggaran Di Desa Brayut sangat berjalan dengan baik, bahkan untuk membuat program Pengurus dan masyarakat mengadakan rapat dan Anggaran/Dana yang di dapat selalu disampaikan di sosialisasi oleh pengurus.

- e. Adanya Pelatihan-Pelatihan untuk Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia)

Pelatihan-Pelatihan sering dilakukan di Desa Brayut, seperti pelatihan mengenai Desa Wisata, Pelatihan Mengenai Program Pemerintah yaitu PNPM Mandiri. Dan masyarakat diberi pelatihan untuk keterampilan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan dan membuat barang-barang yang menciri khasan desa Brayut.

2. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Desa Wisata Pajangan:

- a. masyarakat cenderung tak acuh terhadap kegiatan desa wisata

Di Desa Pajangan Masyarakat memang acuh terhadap Program Pemerintah yang diberi nama Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, dikarenakan tidak adanya sosialisasi untuk mengenalkan program tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai PNMP Mandiri. Karna ketidak tahuan itu berdampak pada kesadaran masyarakat Desa Pajangan.

- b. Kepengurusan dan kelembagaan yang ada di Desa Wisata Pajangan masih dikendalikan oleh satu keluarga, yaitu keluarga Ibu Dukuh yang menjadikan seolah-olah Desa Wisata Pajangan hanya milik keluarga Ibu Dukuh dan bukan milik masyarakat.

Ketika peneliti menjumpai Edi Suwondo, Edi Suwondo tampak bingung dan mengaku bukan dirinyalah yang menjadi pengurus desa wisata. Akhirnya peneliti diarahkan untuk menemui Kepala Dukuh yaitu Tri Suprapti. Jawaban yang serupa pun diterima oleh peneliti dari Tri Suprapti, Tri Suprapti mengakui sampai saat ini tidak ada lembaga atau struktur yang jelas tentang kepengurusan Desa Wisata Pajangan. Selama ini yang mengurus desa wisata

adalah Kepala Dukuh sendiri dibantu oleh beberapa anggota keluarga yang lain. Hal ini seperti yang diungkapkan Tri Suprpti berikut ini:

“kalau lembaga khusus gitu tidak ada *mas*. Misal ada wisatawan yang mengurus saya saja dan dibantu keluarga sudah cukup. Soalnya tamu tidak menginap jadi saya juga sudah cukup”.

Ketiadaan lembaga di Desa Wisata Pajangan sebenarnya merupakan hal yang sangat fatal, karena tidak ada pihak yang menjadi motor penggerak dalam upaya mengembangkan desa wisata. Dengan tidak adanya lembaga, akan sulit desa wisata dapat berkembang karena tidak ada yang membuat program pengembangan. Terkait dengan PNPM Mandiri Pariwisata, ketiadaan lembaga pun sangat merugikan bagi Desa Wisata Pajangan. Dengan tidak adanya lembaga pengurus desa wisata, maka dana yang diterima menjadi tidak terarah peruntukannya. Hal tersebut terjadi di Desa Wisata Pajangan, di mana dana bantuan yang diterima hanya digunakan untuk membeli seperangkat gamelan. Seperangkat gamelan yang dibelanjakan tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap pengembangan Desa Wisata Pajangan. Dalam hal ini yang diuntungkan hanyalah keluarga Kepala Dukuh, Tri Suprpti, di mana Tri Suprpti dan keluarganya merupakan seniman.

Kesulitan mengembangkan Desa Wisata Pajangan termasuk pada saat diterimanya PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata tersebut juga dirasakan oleh Rudi Murwanto. Rudi Murwanto merupakan fasilitator PNPM Mandiri Pariwisata yang mendampingi desa wisata desa wisata penerima PNPM Mandiri Pariwisata di Kelurahan Pendowoharjo. Menurut Rudi, akan terasa berbeda mendampingi desa wisata yang jelas pengurusnya dibandingkan dengan yang tidak. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Rudi Murwanto terkait lembaga pengurus di Desa Wisata Pajangan:

Pajangan dari dulu tidak ada lembaganya, yang mengurus memang Ibu Dukuh. Tidak ada lembaga itu bikin sulit. Kalau ada undangan dari dinas untuk sosialisasi, tidak ada yang datang. Undangan-undangan yang lain juga jarang dihadiri termasuk oleh Ibu Dukuh. Program mereka juga tidak jelas mau dibawa kemana. Mereka sejak dapat dana bantuan pariwisata, hanya untuk beli gamelan. Ya tiga tahun beli gamelan semua. Kan buat apa *tho mas*? Saya sebagai pendamping tentu mengarahkan. Porsi saya terhadap semua desa wisata di Pendowoharjo adalah sama, tidak saya beda-bedakan. Tetapi semuanya kembali ke desa wisata masing-masing mau menjalankan arahan atau tidak. Pajangan ini termasuk sulit, ya itu tadi lembaga saja tidak ada. Tidak ada yang bergerak.

c. Masyarakat tidak memahami tentang PNPM Mandiri Pariwisata

Masyarakat Desa Pajangan tidak mengetahui dengan jelas mengenai program PNMP Mandiri Pariwisata, dikarenakan ketidakjelasan penanggungjawab dan pengurus ditambah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan sehingga masyarakat Desa Pajangan tidak begitu mengerti.

d. Tidak ada transparansi mengenai program dan anggaran

Di Desa Pajangan memang tidak ada transparansi program dan anggaran, dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, hasil dari dana bantuan pemerintahan hanya berupa angklung dan anggaran yang lain tidak jelas entah kemana, salah satu factor penyebabnya adalah pengurus yang tidak jelas dan tidak ada perhatian serta pengawasan dari pemerintah atau instansi yang terkait sehingga tidak ada program dan kemauan yang di dapat oleh Desa Pajangan.

e. Tidak ada pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia)

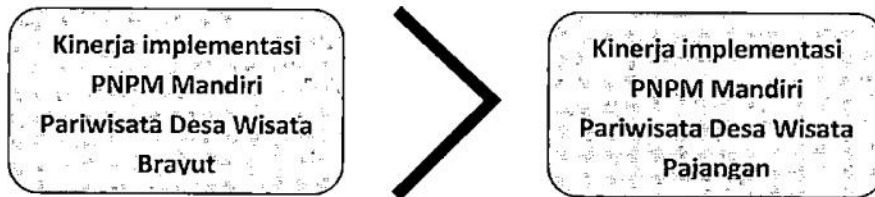
Untuk Desa Pajangan, selama peneliti mencari informasi tidak pernah sama sekali ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di desa tersebut. Seperti yang dijelaskan di atas Desa Wisata Pajangan mengenai Program PNPM Mandiri sangat tidak berjalan, dan semua dikarenakan tidak adanya perhatian dan pengawasan yang dilakukan terhadap penanggungjawab dari Desa tersebut.

Dari Faktor-faktor yang telah di paparkan di atas terlihat jelas perbandingan antara kedua Desa, Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan. Terjadi perbedaan yang sangat jauh, dimana harapan adanya Program Nasional Pemberdayaan Manusia Mandiri ialah untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan pendapatan di sebuah wilayah namun dalam praktek pelaksanaan di lapangan tidak semua yang mendapatkan bantuan PNPM Mandiri bisa mendapatkan hasil yang baik, tidak seperti Desa Wisata Pajangan Di Sleman Yogyakarta. Desa ini mendapatkan bantuan sejak 2009 hingga 2011 namun sangat sedikit perubahan yang dihasilkan, berbeda dengan Desa Wisata Brayut yang letaknya berdekatan dengan Desa Wisata Pajangan, Desa Wisata Brayut dengan adanya PNPM Mandiri mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar.

Jika dikomparasikan antara kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan, maka hasilnya menunjukkan bahwa kinerja PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan di Desa Wisata Pajangan.

Gambar 4.1

Perbandingan Kinerja Implementasi PNPM Mandiri di Desa Wisata Brayut dan Desa
Wisata Pajangan



Perbedaan kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan dipengaruhi oleh faktor *compliance and responsiveness* kelompok sasaran. Di mana kelompok sasaran yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah masyarakat di kedua desa wisata termasuk di dalamnya pengurus desa wisata.